

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS  
SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) DALAM  
MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN  
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**Author:**

Serly Wulandari,<sup>1</sup> Saadah Oktaviani,<sup>2</sup> Mubarak R. Adam<sup>3</sup>

**Affiliation:**

<sup>1, 2, 3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jalan Ir Soekarno Km. 20 Jatinangor – Sumedang, Jawa Barat

**Email:**

serlywulandari@ipdn.ac.id<sup>1</sup>, saadahoktaviani24@gmail.com<sup>2</sup>, barackberri92@gmail.com<sup>3</sup>

**\*Corresponding Author**

Serly Wulandari  
Fakultas Politik Pemerintahan  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
serlywulandari@ipdn.ac.id

Received: September 21, 2022

Revised: October 28, 2022

Accepted: November 11, 2022

Available Online: December 1, 2022

**ABSTRAK**

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait pengangguran. Pengangguran tersebut terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga berpengaruh pada tingkat angkatan kerja dan memerlukan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre (SDC)* sebagai solusi untuk mengatasinya sehingga dapat meningkatkan kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Ruang lingkup dalam melakukan tahapan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre (SDC)* menggunakan Teori Ambar Teguh Sulistiyani dengan dimensi berupa penyadaran, *enabling* dan *empowerment* melalui indikator keberhasilan pemberdayaan dari Sumodiningrat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi serta wawancara kepada 17 orang informan yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik penentuan keabsahan data menggunakan teknik validitas internal. Informan penelitian ditetapkan secara *purposive sampling*. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap penyadaran dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahap *enabling* dilakukan dengan adanya pembagian peran dalam koordinasi dan pengelolaan anggaran serta fasilitasi pelatihan antara pemerintah daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta lembaga pendidikan nonformal melalui Balai Latihan Kerja Lembang. Tahap *empowerment* atau pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat potensi masyarakat sehingga membentuk

kreativitas, inovasi, inisiatif yang mengantarkan pada kemandirian dan kewirausahaan berjumlah 863 orang.

Kata kunci: Pengangguran, Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Pengembangan Keterampilan, Kewirausahaan

### **ABSTRACT**

*West Bandung Regency as one of the regencies in West Java Province is one of the areas experiencing problems related to unemployment. Unemployment occurs due to population growth which is increasing every year so that it affects the level of the workforce and requires community empowerment based on Skill Development Center (SDC) as a solution to overcome it so as to increase entrepreneurship. This study uses a qualitative method with an inductive approach. The scope of carrying out the stages of community empowerment based on the Skill Development Center (SDC) using the Ambar Teguh Sulistiyani Theory with dimensions in the form of awareness, enabling and empowerment through indicators of empowerment success from Sumodiningrat. Data collection techniques through observation, documentation and interviews with 17 informants who were determined through purposive sampling technique. The technique of determining the validity of the data uses an internal validity technique. Research informants were determined by purposive sampling. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that at the awareness stage it was carried out by the Office of Manpower and Transmigration through direct socialization activities to the community and village government in West Bandung Regency. The enabling stage is carried out by dividing roles in coordination and budget management as well as facilitating training between the local government, namely the Office of Manpower and Transmigration and non-formal educational institutions through the Lembang Job Training Center. The empowerment or empowerment stage is carried out by strengthening the community's potential so as to form creativity, innovation, initiatives that lead to independence and entrepreneurship amounted to 863 people.*

*Keywords: Unemployment, Community Empowerment, Skill Development Center (SDC), Entrepreneurship*

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah otonom dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi hakiki pemerintahan yakni memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan dan melakukan pemberdayaan (Rasyid, 2000) menjadi 3 fungsi yang harus dijalankan oleh setiap pemerintahan. Setiap komponen masyarakat dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan harus saling bersinergi guna membangun sebuah daerah yang sejahtera.

Urusan pemerintahan wajib yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain adalah dalam bidang pendidikan dan bidang pemberdayaan. Kedua urusan tersebut saling berkorelasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan sebagai langkah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui kegiatan pemberdayaan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 12 ayat (2) menyebutkan tentang pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam memberdayakan individu, kelompok maupun organisasi dalam masyarakat agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri melalui suatu kegiatan peningkatan keterampilan dan kemampuan sesuai potensi dan adanya akses bantuan anggaran guna mengatasi permasalahan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pemberdayaan sebagai wujud dari pembangunan sumberdaya manusia dilakukan sebagai salah satu solusi menangani masalah kemiskinan melalui kegiatan peningkatan kemampuan, penggalan potensi yang dimiliki sehingga akhirnya masyarakat dapat lebih mandiri. Kemiskinan menjadi tugas pemerintah yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan dengan berbagai faktor penyebab seperti pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kurangnya lapangan pekerjaan, masyarakat yang tergolong usia produktif banyak yang tidak memiliki pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran. Menurut Ni Wayan (Budiani, 2009), apabila jumlah tenaga kerja dan kebutuhan akan tenaga kerja tersebut tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia dapat menjadi salah satu penyebab adanya pengangguran dan berpotensi menimbulkan kerawanan terjadinya suatu konflik sosial dan kemiskinan.

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar, 2022) merupakan salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait pengangguran. Pengangguran tersebut terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahun sehingga berpengaruh pada tingkat angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat. Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan tiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 hingga mencapai 1.699.900 jiwa (*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka,*

2020). Sedangkan jumlah angkatan kerja dan pengangguran pada tahun 2015-2019 penulis sajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1  
Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Bandung Barat  
Tahun 2015-2019

No.	Angkatan Kerja	Tahun (Jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bekerja	585.465	631.417	645.348	683.877	704.266
2.	Pengangguran Terbuka	51.971	54.632	50.985	62.679	62.695

Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2014-2019

Data pada tabel 1 menunjukkan jumlah angkatan kerja yang mencapai 766.961 jiwa pada tahun 2019 dimana sebanyak 704.266 jiwa merupakan penduduk yang bekerja dan sebanyak 62.695 jiwa merupakan penduduk yang menganggur dengan jumlah pengangguran terbanyak selama 5 tahun berjalan (2015-2019) terjadi pada tahun 2019.

Tingginya jumlah angkatan kerja berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat. Angka pengangguran berjumlah 62.695 jiwa dibagi kedalam beberapa golongan sesuai tingkat pendidikan masyarakatnya. Dimana lulusan SD memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi dibandingkan lulusan SMP, SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi, yakni 362.927 orang dengan angka pengangguran mencapai 20.009 orang. Jumlah angkatan kerja lulusan SMP sebanyak 162.665 orang dengan pengangguran sebanyak 15.186 orang dan lulusan SMA/SMK jumlah angkatan kerjanya sebanyak 189.500 orang dengan jumlah pengangguran paling tinggi, yakni mencapai 25.057 orang (*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2020*).

Peningkatan jumlah pengangguran berakibat pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Di Kabupaten Bandung Barat jumlah penduduk miskin tahun 2019 menempati urutan ke 8 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat (*BPS Jawa Barat, 2021*) dengan jumlah total penduduk miskinnya mencapai 159.000 jiwa dari total jumlah penduduk miskin Jawa Barat sebesar 3.399.200 jiwa.

Jumlah angkatan kerja dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Bandung Barat menjadi penyebab perlunya suatu program atau kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Kegiatan usaha

masyarakat tersebut terbagi kedalam beberapa sektor mata pencaharian baik itu pertanian, perindustrian, jasa maupun sektor lainnya. Sektor pertanian dengan presentase mencapai 33,87% dan sektor industri dengan presentase 16,54% menjadi mata pencaharian yang paling diminati masyarakat dibanding mata pencaharian dari sektor lainnya. Sektor pertanian banyak dilakukan mencakup kegiatan pertanian tanaman padi sebesar 25%, tanaman sayuran 4,67% dan buah-buahan sebesar 4,2%. Sektor industri terbagi menjadi usaha mikro kecil sebesar 7,67%, industri pengolahan 5,57% dan sisanya usaha mikro besar sebesar 3,3% (bandungbaratkab.bps.go.id). Namun, pengembangan secara berkelanjutan sektor-sektor usaha tersebut terutama dalam bidang kewirausahaan masih belum berjalan optimal.

Berdasarkan data status pekerjaan penduduk di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 (*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka*, 2020), jumlah yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai sebanyak 293.920 orang, pekerja bebas dan pekerja keluarga mencapai 155.156 orang, pekerja yang berwirausaha baik sendiri, dibantu buruh tidak tetap maupun dibantu buruh tetap berjumlah 255.190 orang. Artinya, status pekerjaan dari segi berwirausaha (berusaha sendiri) masih jauh lebih sedikit dibanding jumlah penduduk yang bekerja sebagai karyawan/pegawai. Rendahnya status pekerjaan sebagai wirausaha harus menjadi perhatian agar dapat lebih ditingkatkan di Kabupaten Bandung Barat.

Jumlah penduduk yang bekerja dengan berusaha sendiri baik dibantu buruh tidak tetap maupun buruh tetap yakni 255.190 orang, masih jauh lebih sedikit dibanding penduduk yang bekerja sebagai karyawan/pegawai dengan jumlah 293.920 orang (*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka*, 2020). Artinya, jumlah penduduk yang dapat memanfaatkan potensi daerahnya masih perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pengembangan atau pelatihan agar *soft skill* dan pengetahuan yang dimiliki, kreatifitas dan jiwa inovatif penduduk semakin meningkat sehingga dapat melakukan usaha sendiri tanpa bergantung pada lapangan pekerjaan yang ada. Pada akhirnya, kegiatan wirausaha (berusaha sendiri) semakin banyak bermunculan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk yang belum memiliki pekerjaan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berusaha untuk mengurangi pengangguran (Zein, 2019) serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang tergolong dalam usia produktif perlu dilatih dalam kewirausahaan dan program wirausaha baru. Melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Pasal 31 Angka 3 Huruf (f) dapat diketahui bahwa pendidikan non formal bagi masyarakat salah satunya adalah pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas pasal 2 angka 2 huruf (c), dinas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan hubungan industrial dan syarat kerja. Pada pasal 8 Angka 3 huruf (v) seksi pelatihan kerja mempunyai tugas, menyiapkan bahan-bahan pelatihan, meliputi program pelatihan, dan prasarana, instruktur dan tenaga pelatihan, dan calon pelatihan kerja.

Kabupaten Bandung Barat melakukan pemberdayaan masyarakat dalam suatu bentuk pendidikan non formal yaitu *Skill Development Centre* (SDC) atau Program Pusat Pengembangan Keterampilan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.209-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/2019 tentang Pembentukan Forum *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui program *Skill Development Centre* tersebut berkomitmen dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan menjadi dibawah angka rata-rata nasional yang diimbangi dengan adanya inovasi. Karena penduduk lulusan SMA dan SMK tiap tahunnya mencapai 25 ribu orang namun hanya 40% yang melanjutkan dan diperkirakan ada 63.000 pengangguran di pertengahan tahun 2020 yang salah satunya diatasi melalui program *Skill Development Centre* (Huba, 2020).

Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah Bandung dan Jawa Barat untuk melatih dan meningkatkan *skill* dan keahlian masyarakat agar berdaya saing lebih dengan tenaga kerja dari daerah lain. Kabupaten Bandung Barat menargetkan angka pengangguran dapat berkurang sedikitnya 20 ribu orang tiap tahun dan dapat mengurangi minimal 100 ribu angka pengangguran (Zein, 2019). Target melalui Balai Latihan Kerja akan mendidik 3.200

pencari kerja di Kabupaten Bandung Barat untuk berwirausaha di bidang peternakan dan pertanian baik dari mekanisme hingga pengolahan hasilnya (Haryanto, 2019).

Program pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) tersebut masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta kegiatan justru karena adanya kekhawatiran terhadap keberlanjutan kewirausahaan yang sudah mereka jalankan. Padahal, pelatihan berbasis pusat pengembangan keahlian ini dilakukan mulai dari pelatihan hingga evaluasi dan pendampingan lanjutan secara berkala dengan jenis wirausaha yang lebih berdaya saing. Oleh karena berbagai penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya serta adanya keinginan peneliti untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam Meningkatkan Kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam Meningkatkan Kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan keabsahan data menggunakan teknik validitas internal. Informan penelitian ditetapkan secara *purposive sampling* berjumlah 17 orang. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun ruang lingkup dalam melakukan tahapan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) menggunakan Teori Ambar Teguh Sulistiyani dengan dimensi berupa penyadaran, *enabling* dan *empowerment* melalui indikator keberhasilan pemberdayaan dari Sumodiningrat. Dimana Menurut Sulistiyani, hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu tahap penyadaran atau pembentukan perilaku sehingga mendorong peningkatan kapasitas diri, tahap transformasi atau perubahan kemampuan baik wawasan maupun keterampilan dasar, serta tahap peningkatan

kemampuan intelektual sehingga mengantarkan pada kemandirian melalui inisiatif dan inovasi (Sulistiyani, 2004). Lebih lanjut, keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (Sulistiyani, 2004) ditentukan oleh lima indikator yang meliputi berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkembangnya usaha penduduk miskin melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga pendapatannya dapat meningkat, peningkatan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya melalui kepedulian masyarakat. Keempat, kemandirian kelompok menjadi meningkat dengan bertambahnya produktivitas usaha anggota dan kelompok, pembiayaan, tertibnya sistem administrasi serta makin luasnya interaksi kelompok lain dalam masyarakat. Kelima, kapasitas dan pemerataan pendapatan masyarakat meningkat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS *SKILL DEVELOPMENT CENTRE* (SDC) DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam Meningkatkan Kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat ini dideskripsikan dan dianalisis menggunakan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh Sulistiyani dengan tiga dimensi tahapan pemberdayaan masyarakat:

#### **1. Penyadaran**

Dimensi penyadaran dalam hasil observasi peneliti dilakukan dengan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dengan informasi penting terkait latar belakang, tujuan dan sasaran diadakannya pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat.

##### **a. Latar Belakang dan tujuan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Skill Development Centre* (SDC)**

Latar belakang dan tujuan pemberdayaan masyarakat berbasis SDC tercantum dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 188.45/Kep.209-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/2019 tentang Pembentukan *Forum Skill Development Centre* (SDC)



Kabupaten Bandung Barat. Dimana berdasarkan Keputusan Bupati tersebut serta hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa latar belakang pemberdayaan masyarakat berbasis SDC dilakukan untuk membangun ketenagakerjaan dan mendorong pertumbuhan perekonomian sebagai suatu upaya berkesinambungan agar partisipasi kerja dari angkatan kerja meningkat bahkan mampu berwirausaha dan tentunya akan mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan untuk membentuk pusat pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang tidak atau belum memiliki pekerjaan (pengangguran) melalui kegiatan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan terkait peningkatan keterampilan, kemampuan, dan keahlian masyarakat sehingga mampu berdaya saing dan memiliki kreatifitas serta inovasi dalam pengembangan usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya melalui kegiatan kewirausahaan.

**b. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Skill Development Centre* (SDC) di Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat dan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa sasaran diadakannya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Skill Development Centre* (SDC) di Kabupaten Bandung Barat yaitu warga pengangguran yang tergolong belum memiliki pekerjaan baik di dunia industri maupun dunia usaha. Terkait penelitian yang penulis lakukan di lapangan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Skill Development Centre* (SDC) di Kabupaten Bandung Barat benar-benar dilakukan terhadap warga yang belum atau tidak bekerja melalui perekrutan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan wirausaha yang telah diverifikasi melalui pelatihan keterampilan dan keahlian di Balai Latihan Kerja Lembang guna meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, wawancara dan observasi dilapangan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penyadaran menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut guna mengingatkan, memberikan informasi, menyamakan persepsi/pemahaman, mencerahkan, memotivasi dan membantu memecahkan permasalahan sehingga kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan akan tumbuh, yang pada akhirnya dapat mendorong kemandirian masyarakat. Menurut Wrihatnolo et al., tahap penyadaran juga merupakan

salah satu tahapan dari 3 tahapan dalam pemberdayaan. Dimana menurut (Wrihatnolo et al., 2007) “pemberdayaan terdiri atas 3 (tiga) tahapan yang mencakup tahap penyadaran, pengkapasitasan dan tahap pemberian daya itu sendiri sehingga menumbuhkan kemandirian”. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan harus tepat sasaran dan tujuannya. Hal tersebut dinyatakan pula oleh (Mardikanto, 2014) yang berpendapat bahwa “tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk perbaikan yang mencakup kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan, dan perbaikan masyarakat”. Tujuan pemberdayaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardikanto tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis SDC di Kabupaten Bandung Barat. Pendapat Wrihatnolo et al., dan Mardikanto yang telah diuraikan semakin memperkuat tahapan penyadaran sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pemberdayaan.

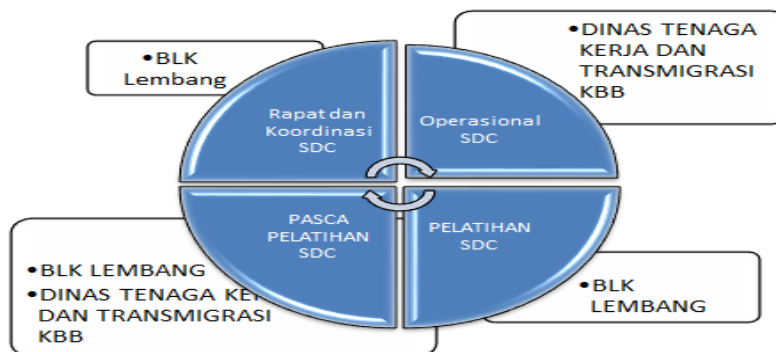
## **2. *Enabling***

Dimensi *enabling* mencakup beberapa hal penting terkait diadakannya pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat yaitu peran Pemerintah dan Lembaga pendidikan nonformal agar mendapat partisipasi masyarakat Bandung Barat, kendala pelaksanaan *Skill Development Centre* (SDC), dan anggaran yang digunakan dalam *Skill Development Centre* di dalam meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat.

### **a. Peran Pemerintah dan Lembaga Pendidikan Non Formal agar Masyarakat Bandung Barat Berpartisipasi dalam Pelaksanaan *Skill Development Centre* (SDC) di Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pasal 2 angka 2 huruf (c), dinas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan hubungan industrial dan syarat kerja. Berdasarkan peraturan dan keputusan tersebut, maka pendidikan non formal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan lembaga pendidikan non formal sebagaimana peneliti sajikan pada gambar 1 berikut.

Gambar 1  
Peran Pemerintah dan Lembaga Pendidikan Nonformal pada Kegiatan  
*Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat



Sumber : Diolah Penulis, 2021

Gambar 1 menunjukkan tentang peranan pemerintah dan lembaga pendidikan non formal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat. Baik Pemerintah maupun Balai Latihan Kerja Lembang memiliki peranan penting dan saling berkaitan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, bahwa pelaksanaan *Skill Development Centre* (SDC) bertujuan untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Bandung Barat, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk melakukan pendidikan non formal bagi masyarakat melalui kegiatan pelatihan di Balai Latihan Kerja Lembang dengan penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, pemberian materi serta biaya intensif pelatihan bagi masyarakat yang sudah verifikasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya baik di dunia industri maupun dunia usaha mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan wirausaha yang dilakukan masyarakat.

#### **b. Kendala Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam Meningkatkan Kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan pernyataan Kepala Seksi pelatihan kerja dan produktivitas Kabupaten Bandung Barat, bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan berbasis *Skill Development Centre* terkendala dari sisi anggaran dan partisipasi masyarakat. Dimana jumlah pendaftar kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill*

*Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 berjumlah 1393 orang dari total jumlah masyarakat yang menganggur sebanyak 62.695 orang (*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka*, 2021). Dengan demikian, partisipasi masyarakat tergolong masih minim dan belum aktif untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja Lembang. Pernyataan tersebut didukung dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Balai Latihan Kerja Lembang terkait kendala yang bukan hanya dari partisipasi masyarakat namun juga terkait anggaran. Disamping itu, *Mindset* atau pola pikir masyarakat masih belum terbuka mengenai kegiatan pelatihan dalam pengembangan keahlian masyarakat, sehingga membuat kegiatan *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lebih lanjut, ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan belum lengkap dan hanya bisa berjalan pada pelatihan bidang pertanian dan peternakan. Pusat pengembangan keahlian yang dilakukan juga belum terkoordinasi secara menyeluruh pada setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan pelatihan juga belum maksimal dilakukan seperti belum adanya *workplace* dalam pelatihan kerja untuk dunia industri dan belum tersedianya lahan pengembangan kegiatan pertanian dalam kewirausahaan.

### **c. Anggaran yang Digunakan dalam *Skill Development Centre* di dalam Meningkatkan Kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan pernyataan Ketua Balai Latihan Kerja di Kabupaten Bandung Barat (BLK Lembang), bahwa pelaksanaan *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat menggunakan anggaran *Sharing Budget* antara Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kementerian yang sudah memberikan kontribusi anggaran berasal dari Kementerian Tenaga Kerja. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah memberikan kontribusi tetapi bukan untuk anggaran melainkan dalam hal membimbing dan membina Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan kegiatan *Skill Development Centre*.

Lebih lanjut, program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat menggunakan dana APBD sebesar 59.065.000 rupiah untuk 165 orang dan anggaran untuk pelatihan keterampilan wirausaha sebesar 4.708.849.000 rupiah untuk 863 orang atau sebesar 5.456.372 rupiah untuk masing-masing warga binaan dari mulai pelatihan hingga pasca pelatihan selama 16 hari kerja di Balai Latihan Kerja Lembang dengan sumber anggaran peneliti sajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2  
Sumber Anggaran Pelaksanaan *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Sumber Anggaran	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rapat dan Koordinasi	KEMNAKER	25.700.000
2	Operasional SDC	KEMNAKER DAN DINAS	4.942.949.000
3	Pelatihan SDC	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KBB	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pusat pengembangan keahlian dalam pembiayaannya menggunakan sistem *budget sharing* yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung Barat dan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dengan jumlah anggaran sebesar 4.977.969.000 rupiah selama satu tahun. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat terlibat dalam penanggung jawab penggunaan anggaran dari operasional kegiatan pelatihan wirausaha hingga pasca pelatihan dilaksanakan, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja memberikan bantuan untuk kegiatan koordinasi dan operasional serta pelaksanaan pelatihan di Balai Latihan Kerja Lembang.

Berdasarkan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dengan para pihak kerja sama khususnya dengan Nomor 563/MoU.30-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/2019 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Pusat Pengembangan Keahlian atau *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat

pasal 6 terkait pembiayaan menjadi tanggung jawab para pihak yang salah satunya adalah Kementerian Tenaga Kerja, yang didukung oleh pernyataan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, wawancara dan observasi dilapangan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa *enabling* menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dimana untuk mendorong transformasi atau perubahan kemampuan baik wawasan maupun keterampilan dasar yang dimiliki oleh masyarakat, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan harus mengetahui dengan jelas peranannya masing-masing. Hal tersebut dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dan program-program dilapangan serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal serupa dikemukakan oleh (Tricahyono, 2008), dimana “pemberdayaan harus mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan yang mencakup kegiatan pembangunan bersifat lokal dan adanya aksi sosial, menggunakan pendekatan organisasi komunitas dan partisipasi anggota kelompok, adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja, serta adanya keadilan sehingga mencapai kesejahteraan sosial”. Pernyataan Tricahyono tersebut sesuai dengan tahapan *enabling* yang dilakukan dengan proses pembagian peran antara pemerintah dan Lembaga non formal untuk melakukan Pendidikan non formal (menunjukkan proses pembangunan bersifat lokal karena berasal dari Pemerintah Daerah dan Lembaga non formal yang berada didaerah terkait, adanya pendekatan organisasi dan kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja). Disamping itu adanya pelibatan partisipasi anggota kelompok yang dalam hal ini adalah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pelatihan. Serta adanya keadilan sehingga mencapai kesejahteraan sosial yang dapat dilihat dari kesamaan penyediaan sarana prasarana pelatihan, pemberian materi serta biaya intensif pelatihan bagi masyarakat yang sudah memverifikasi dirinya untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi jelas bahwa tahapan *enabling* menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemberdayaan.

### **3. Empowerment**

*Empowerment* atau pemberdayaan merupakan tahapan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat semakin berdaya. Tahapan ini memperkuat potensi masyarakat sehingga membentuk kreativitas dan inovasi serta inisiatif dalam menghadapi peluang yang ada dalam pembangunan masyarakat dan mengantarkan pada kemandirian masyarakat. Kegiatan pemberdayaan

masyarakat berbasis *Skill Development Centre* diharapkan menjadi suatu wadah pengembangan keahlian masyarakat melalui peningkatan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat yang berdampak kepada kegiatan kemandirian masyarakat dan pengurangan jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat.

**a. Kemandirian Masyarakat dalam Membentuk Inisiatif, Kreasi dan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan pernyataan dari salah satu warga binaan *Skill Development Centre* Kabupaten Bandung Barat bidang pertanian kacang Edamame, bahwa kegiatan pertanian kacang edamame yang dilakukan di Desa Mekarsari sudah berjalan baik meskipun banyak kendala terkait modal dan lahan pertanian. Modal pertanian masih bersifat individu sehingga pengelolaannya melibatkan anggota kelompok dan pembelian benih yang awalnya dibeli secara online dari Jember, Jawa Timur melalui pendampingan dan sekarang dibeli dari *buyer*. Selain itu, lahan pertanian diperluas dengan kegiatan sewa lahan per tahun, sehingga kegiatan pertanian kacang edamame bisa terus berjalan.

Pernyataan tersebut didukung pula oleh salah satu warga binaan *Skill Development Centre* bidang peternakan yaitu ternak puyuh petelur terkait kemandirian masyarakat, bahwa kegiatan ternak puyuh petelur dilakukan di Desa Mekar Tanjung berjalan baik dengan adanya bantuan modal berupa 1050 ekor puyuh petelur yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Balai Latihan Kerja. Sehingga pakan menjadi hal penting dan dibutuhkan lebih banyak. Kami akhirnya membuat pakan modifikasi menggunakan dedak jagung dan ikan yang lebih menghemat biaya pakan puyuh petelur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, kemandirian masyarakat akan membentuk inisiatif, inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam kegiatan usaha melalui inovasi pengelolaan produksi pertanian maupun peternakan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* telah membentuk kemandirian masyarakat yang menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha dalam meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat yang berwirausaha.

## **b. Berkurangnya Jumlah Pengangguran di Kabupaten Bandung Barat**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat melalui kegiatan pengembangan keahlian dalam rangka meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat. Jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 masih tinggi dan berjumlah sebanyak 62.695 jiwa dengan jumlah wirausaha buruh tetap yang hanya sebanyak 20.575 jiwa. Sedangkan pencari kerja terbanyak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 berdasarkan kelompok umur adalah pada usia 15-20 tahun yaitu sebanyak 7.009 orang (*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2021*).

Lebih lanjut, Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi pelatihan kerja dan produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa jumlah pencari kerja yang mendaftar untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) di Kabupaten Bandung Barat tersebar di 16 kecamatan dan 147 desa sebanyak 4.909 orang yang di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.985 orang, perempuan sebanyak 1.924 orang, sedangkan berdasarkan pendidikan terdapat empat kategori yaitu kategori tidak bersekolah sebanyak 35 orang, kategori pendidikan dasar (SD dan SMP) sebanyak 948 orang, kategori menengah atas sebanyak 2.928 orang, dan kategori perguruan tinggi sebanyak 998 orang. Jumlah masyarakat yang mendaftar sebanyak 4.909 orang tersebut melakukan pelatihan lanjutan oleh Balai Latihan Kerja dan hanya sebanyak 863 orang diberdayakan dalam kegiatan pertanian dan peternakan (*Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2021*).

Partisipasi angkatan kerja masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang menganggur pada tahun 2019 sudah mulai ada peningkatan dalam bidang kewirausahaan pertanian dan peternakan, yaitu sebanyak 863 orang dengan Kecamatan Lembang sebagai salah satu kecamatan terbanyak dalam kegiatan kewirausahaan dengan jumlah 376 wirausaha baru bidang pertanian dan peternakan (*Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, 2021*).

Pelaksanaan *Skill Development Centre* (SDC) dalam kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat paling banyak merupakan warga binaan Balai Latihan Kerja Lembang yang terdapat di kecamatan Lembang dengan jumlah warga binaan pada



wirusaha pertanian terbanyak pada tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 345 orang dan bidang peternakan sebanyak 31 orang. Namun pelaksanaannya belum menyeluruh karena pada kecamatan Saguling belum terdapat warga binaan di bidang pertanian maupun peternakan. Secara umum jumlah pengangguran berkurang 863 jiwa menjadi 61.832 jiwa atau berkurang sebanyak 1,37% dari 8,17% menjadi 6,8% (*Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat*, 2021).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan data penelitian yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat mampu mengurangi jumlah pengangguran melalui kegiatan pengembangan keahlian yang menghasilkan kegiatan kewirausahaan masyarakat dan sejumlah 863 orang menjadi wirusaha baru baik di bidang pertanian maupun peternakan di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa ahli diantaranya (Suharto, 2014) yang menyatakan bahwa “pemberdayaan diarahkan guna menguatkan kekuasaan kelompok yang tidak berdaya di masyarakat baik karena kondisi internal maupun eksternal”. Lebih lanjut, (Harry Hikmat, 2006) juga menyatakan bahwa “pemberdayaan bertujuan untuk menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomis dan sosial budaya dalam masyarakat”. Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut, Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel juga menyatakan bahwa “kewirausahaan adalah kegiatan kreatif dalam pembangunan sesuatu yang belum ada” (Nurseto, 2012). Disisi lain, (Sukidjo, 2012) juga menyatakan bahwa “Suatu kegiatan pengembangan produktivitas maupun usaha tidak terlepas dari adanya suatu tujuan dan manfaat. Adapun manfaat dan tujuan kewirausahaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain”. Pendapat beberapa ahli tersebut sejalan dengan tahapan *empowerment* atau pemberdayaan yang merupakan tahapan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat semakin berdaya. Potensi masyarakat diperkuat sehingga dapat membentuk kreativitas dan inovasi serta inisiatif dalam menghadapi peluang yang ada dalam pembangunan dan mengantarkan pada kemandirian masyarakat. Pada akhirnya masyarakat dapat melakukan kegiatan kewirausahaan yang ditunjukkan dengan adanya 863 orang wirusaha baru baik di bidang pertanian maupun peternakan. Jadi sangat jelas bahwa tahapan *empowerment* atau pemberdayaan menjadi salah satu tahapan paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

## **TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS *SKILL DEVELOPMENT CENTRE* (SDC) DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT**

Penentuan keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis SDC dalam meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat dianalisis menggunakan lima indikator menurut Sumodiningrat sebagai berikut:

### **a. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat setiap tahunnya mengalami penurunan mulai dari tahun 2017 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 190 ribu rumah tangga miskin hingga pada tahun 2019 mencapai 159 ribu rumah tangga miskin (*BPS Jawa Barat, 2021*). Sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada jumlah pengangguran yang semakin meningkat dan tidak terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pusat pengembangan keahlian.

Kegiatan pemberdayaan berbasis *Skill Development Centre* yang dimulai pada tahun 2018 telah banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya melalui kegiatan usaha di bidang pertanian dan peternakan yang berjalan hingga sekarang. Hal ini didukung dengan apa yang diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa kegiatan pemberdayaan melalui *Skill Development Centre* ini karena pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat mencapai 11,49 %, dengan 55,77 % adalah tidak memiliki pekerjaan dengan 19,16 % bekerja pada sektor pertanian. Jumlah penduduk miskin sebagian besar adalah lulusan SD/SLTP sebanyak 77,33 %, tidak lulus SD sebesar 13,6 % dan sisanya 9,07 %. Sehingga kegiatan ini lebih memprioritaskan sektor pertanian dengan dunia industri yang masih dipersiapkan peralatan pelatihannya.

### **b. Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat melalui usaha kewirausahaan di bidang pertanian dan peternakan sudah menunjukkan adanya perubahan pendapatan masyarakat melalui

usaha produk pertanian berupa kacang edamame dan telur puyuh. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu wirausaha bidang pertanian, bahwa pertanian kacang edamame bagi kelompok tani mendatangkan keuntungan meskipun tidak banyak. Namun, dapat menambah pendapatan yang berkelanjutan melalui hasil produksi kacang yang dipanen setiap tiga bulan setelah penanaman sebagaimana peneliti sajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3  
 Keuntungan Usaha Pertanian Kacang Edamame Tahun 2019

No	Kegiatan	Harga	Jumlah	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran				Rp. 7.300.000
1	Pembelian Benih	Rp. 10.000	7 kg	Rp.700.000
2	Pengelolaan Penanaman	Rp.3.000.000		Rp. 600.000
3	Biaya pemetikan dan Penyortiran	Rp.5.000	1.200 kg	Rp. 6.000.000
Pemasukan				Rp. 13.200.000
4	Penjualan ke <i>buyer</i> ( <i>grade premium</i> )	Rp.11.000	1.200 kg	Rp.13.200.000
Keuntungan usaha				Rp.5.900.000

Sumber : Diolah Penulis, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kacang edamame dijual kepada *buyer* dengan tarif Rp. 11.000,00 per kilogram untuk kualitas grade premium. Keuntungan yang didapat dari satu kali panen dengan lahan 1000 meter bisa mencapai 1200 kilogram dengan menghabiskan benih sebanyak 7 kilogram yang harganya Rp.10.000,00 per kilogram. Keuntungan bersihnya setelah dikurangi biaya upah pemetikan dan penyortiran adalah Rp.5.000,00. Biaya pengelolaan penanaman mencapai Rp.3.000.000,00 sehingga pendapatan yang didapat sebesar Rp. 600.000,00. Sedangkan bagi anggota tani kacang edamame pendapatannya tergantung kegiatan pengelolaan penanaman hingga pemetikan yang per harinya diberi upah Rp.100.000,00 dengan upah pemetikan Rp.2.000,00 per kilogram.

Pendapatan bagi peternak puyuh petelur didapatkan dari hasil penjualan telur puyuh sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu wirausaha peternakan puyuh petelur, bahwa pendapatan masyarakat yang tergabung dalam kelompok peternak telur puyuh didapatkan dari hasil penjualan telur puyuh di desa Mekar Tanjung yang dipanen

setelah 45 hari dengan jumlah telur sebanyak 475 butir per bulan atau sebanyak 5 kilogram. Telur tersebut dijual seharga Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per kilogram kepada warga sekitar dan mendapat hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengeluaran pakan sebanyak 22 kilogram dengan harga Rp. 147.400,00 (Seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga pendapatannya sebesar Rp. 1.352.600,00 (Satu juta tiga ratus limapuluh dua ribu enam ratus rupiah) per bulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat dikatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan kewirausahaan dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat kelompok pelatihan. Pendapatan yang diperoleh tidak terlalu besar bagi masyarakat namun bersifat keberlanjutan yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat khususnya anggota *Skill Development Centre*.

#### **c. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka kegiatan pertanian dan peternakan sebagai *output* kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat sudah memberikan kepedulian bagi sesama khususnya bagi warga yang menganggur sehingga ikut serta dalam kegiatan pertanian dan peternakan, baik sebagai pekerja maupun mitra usaha dalam pengembangan usaha yang dilakukan. Kepedulian masyarakat dapat dilakukan dengan adanya *sharing knowledge* kepada masyarakat lainnya sehingga dapat membuka peluang pekerjaan baru dan meningkatkan kuantitas wirausaha di daerah sekitar.

#### **d. Meningkatkan Kemandirian Kelompok**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga binaan di bidang Pertanian bahwa pelatihan melalui Balai Latihan Kerja di Lembang hingga membuat usaha pertanian kacang edamame pada awalnya terus melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, baik dalam kegiatan pembelian bibit kacang, penanaman dan pengelolaan, pemetikan hingga pemanenan dan pemasaran masih selalu membutuhkan pendampingan dinas. Namun, kini telah dilakukan sendiri seperti mencari bibit kacang secara *online*, pengelolaan dengan sewa lahan, hingga pemasaran kepada *buyer* dengan dinas tersebut tetap melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu wirausahaan juga sudah mulai membuka peluang kerja bagi

masyarakat melalui kegiatan pemetikan dan penyortiran kacang edamame hingga pemberian informasi tentang penanaman kacang edamame dengan tujuan banyak yang ikut serta dalam wirausaha kacang edamame. Akhirnya, masyarakat yang menganggur banyak ikut serta dalam wirausaha bahkan ikut dalam penanaman kacang edamame di lahannya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, maka kemandirian kelompok dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui *Skill Development Centre* di Kabupaten Bandung Barat dapat meningkat sesuai dengan bidang usahanya. Kemandirian kelompok meningkat melalui kegiatan usaha pertanian dan peternakan melalui kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasil usaha. Sehingga monitoring dan evaluasi usaha harus dilakukan anggota pelatihan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha di masa yang akan datang.

#### **e. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan**

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan sudah dilakukan melalui usaha pertanian kacang edamame. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan perekrutan mitra usaha dengan warga yang menganggur sehingga menambah jumlah pelaku usaha kacang edamame dan dapat menghasilkan pendapatan yang merata sesuai dengan yang dikerjakan oleh pelaku usaha pertanian setelah adanya pemasaran dengan hasil usaha yang dibagi sesuai yang telah dilakukan. Begitupula yang dilakukan dalam kegiatan peternakan puyuh petelur, bahwa peningkatan kapasitas kedepannya dalam pengembangan usaha ternak melalui *sharing knowledge* kepada masyarakat sekitar dan pemerataan pendapatan diberikan setiap hasil panen, yaitu setiap 70 hari sekali sesuai dengan hasil usaha penjualan telur puyuh.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh Sulistiyan yang terdiri dari tahapan penyadaran, *enabling*, dan *empowerment* serta indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat sudah berjalan dengan baik dan berhasil namun masih belum

optimal karena terjadinya berbagai kendala seperti masih kurangnya anggaran dan sarana prasarana pelatihan, masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan serta belum optimalnya sinergi antar instansi yang peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat
  - a. Tahap penyadaran dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat terkait latar belakang, tujuan dan sasaran kegiatan sehingga masyarakat dan aparat desa mampu memahami bahwa pusat pengembangan keahlian yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat sehingga dapat berdaya baik dalam dunia industri maupun dunia usaha atau dalam kewirausahaan.
  - b. Tahap *enabling* dilakukan dengan adanya pembagian peran antara pemerintah daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam koordinasi dan pengelolaan anggaran serta fasilitas pelatihan maupun evaluasi pasca pelatihan, dan lembaga pendidikan nonformal melalui Balai Latihan Kerja Lembang yang berperan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan selama 16 hari kerja pada setiap bidang pelatihan. Namun masih terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaannya seperti masih kurangnya anggaran dan sarana prasarana pelatihan, masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan serta belum optimalnya sinergi antar instansi.
  - c. Tahap *empowerment* atau pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat potensi masyarakat sehingga membentuk kreativitas dan inovasi serta inisiatif dalam menghadapi peluang yang ada dalam pembangunan masyarakat dan mengantarkan pada kemandirian masyarakat. Balai Latihan Kerja Lembang memberikan modal awal kepada setiap wirausahawan baik dalam pemberian bibit awal sebanyak 7 kg maupun bantuan 1.050 ekor puyuh serta diberi keleluasaan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha dengan tetap adanya pendampingan dan evaluasi berkala (3 bulan sekali) kepada wirausahawan.

2. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre* (SDC) dalam meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat ditunjukkan dengan adanya peningkatan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat pada bidang pertanian sebanyak 733 orang berwirausaha dalam produk pertanian kacang edamame dan 130 orang berwirausaha di bidang peternakan puyuh petelur. Sehingga, jumlah pengangguran sebanyak 62.695 orang dengan jumlah pencari kerja sebanyak 17.194 orang berkurang menjadi 15.801 orang melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *Skill Development Centre*, yaitu sebanyak 863 orang diberdayakan dalam kegiatan wirausaha pertanian dan peternakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Jawa Barat. (2021).
- BPS Kabupaten Bandung Barat. (2019). <http://bandungbaratkab.bps.go.id>
- Budiani, N. W. (2009). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. (2021).
- Harry Hikmat. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*.
- Haryanto, A. (2019). *Sinergitas SDC-BLK KBB Target Cetak 3.200 Wirausahawan Baru* Artikel ini telah diterbitkan di halaman *SINDOnews.com* pada Senin, 18 Februari 2019 - 21:21 WIB oleh Adi Haryanto dengan judul “Sinergitas SDC-BLK KBB Target Cetak 3.200 Wirausahawan Baru”. Untuk. *SINDONEWS.com*. <https://daerah.sindonews.com/>
- Huba. (2020). *Berhasil Kelola Ketenagakerjaan, 25.000 Warga KBB Terserap Industri*. <https://www.pasundanekspres.co/>
- Kabupaten Bandung Barat dalam Angka. (2020).
- Kabupaten Bandung Barat dalam Angka. (2021).
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nurseto, T. (2012). Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jep.v1i1.675>

- Pemprov Jabar. (2022). *Portal Jabar - Satu Portal untuk Semua Hal Tentang Jawa Barat*. <https://jabarprov.go.id/>
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukidjo. (2012). *Peran Pendidikan Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Trichayono, S. A. (2008). *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Wrihatnolo, R, R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zein, M. (2019). *Angka Pengangguran Tinggi, Ini 4 Program yang Digulirkan Disnakertrans KBB – Ada Magang ke Jepang Lho!*  
<https://bandungkita.id/2019/11/12/>